

TESIS

**KEWENANGAN PENGADILAN DALAM
PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL**



oleh

**SILVIA KUMALASARI
NIM. 2320215320040**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

**KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PEMBATALAN
AKTA PENCATATAN SIPIL**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**SILVIA KUMALASARI
NIM. 2320215320040**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

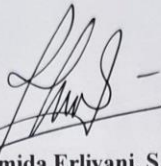
2025

Judul Tesis : Kewenangan Pengadilan Dalam Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Nama : Silvia Kumalasari
NIM : 2320215320040

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

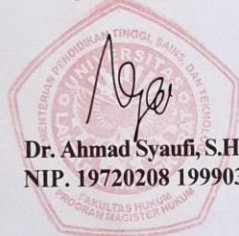
Pembimbing



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui,

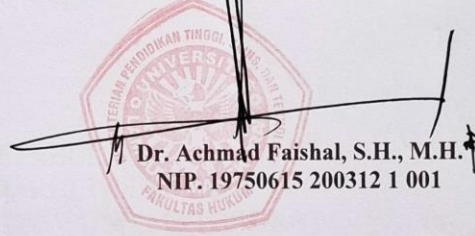
**Koordinator Program Studi
Program Magister Hukum**



Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Tanggal Lulus :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

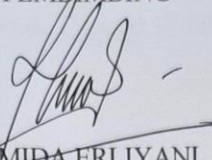


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Wisuda :

TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK
DINILAI PADA TANGGAL 18 JULI 2025

PEMBIMBING



DR. HJ. RAHMIDA ERLIYANI, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

DISAHKAN OLEH
KOORDINATOR PROGRAM STUDI
PROGRAM MAGISTER HUKUM



DR. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

DIKETAHUI OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



DR. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 18 Juli 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

MOTO

"Ilmu tanpa integritas adalah kehampaan. Hukum tanpa keadilan hanyalah kekuasaan tanpa makna."

"Belajar hukum bukan sekadar menghafal pasal, tetapi memahami manusia dan memperjuangkan keadilan."

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, Dzat Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tak terhingga.
2. Kedua orang tua tercinta, yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, doa yang tiada henti, serta menjadi sumber inspirasi dan kekuatan sepanjang perjalanan hidup ini.
3. Dosen pembimbing dan penguji, yang dengan tulus membagikan ilmu, pengalaman, dan arahan akademik yang sangat berharga bagi penyusunan tesis ini.
4. Almamater tercinta, Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Program Magister Ilmu Hukum, yang telah memberikan ruang dan kesempatan untuk belajar dan berkembang secara intelektual maupun pribadi.
5. Seluruh sahabat dan rekan seperjuangan, yang telah memberikan semangat, bantuan, dan kebersamaan dalam menempuh jenjang pendidikan ini.

Semoga karya ini menjadi amal jariyah ilmu yang bermanfaat serta pijakan kecil menuju kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan penegakan keadilan di Indonesia.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvia Kumalasari
NIM : 2320215320040
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 14 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,

A 10,000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPAHUN BUKU KEPANCA', '10000', 'METERAI', and 'TELPAKEL'. The serial number '2323AMX410427069' is visible at the bottom left of the stamp.

Silvia Kumalasari
NIM 2320215320040

KUMALASARI, SILVIA. 2025. KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. 121 halaman.

RINGKASAN

Tesis ini mengkaji tentang kewenangan pengadilan dalam pembatalan Akta Pencatatan Sipil, yang merupakan bagian penting dari sistem administrasi kependudukan dan perlindungan hak sipil warga negara. Akta Pencatatan Sipil, seperti akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan pengakuan anak, merupakan dokumen otentik yang menjadi bukti sah status keperdataan seseorang. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pembatalan akta dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, tetapi tidak menyebut secara eksplisit pengadilan mana yang berwenang. Akibatnya, terdapat dualisme praktik antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan keraguan di masyarakat. Ketidakjelasan ini diperparah dengan lemahnya implementasi asas *contrarius actus*, yang seharusnya memungkinkan pejabat penerbit akta untuk membatalkannya secara administratif tanpa pengadilan. Praktik pembatalan akta melalui pengadilan masih dominan karena kebutuhan pembuktian dan kehati-hatian pihak instansi terkait. Dalam beberapa putusan pengadilan ditemukan bahwa keduanya baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara terkadang menerima dan terkadang menolak perkara pembatalan Akta Pencatatan Sipil, menunjukkan inkonsistensi yang membingungkan masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif, yang dikaji melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus (yurisprudensi), dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode analisis kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara sistematis dan kritis bagaimana pengaturan kewenangan pengadilan atas pembatalan akta, serta untuk mengidentifikasi dan memberikan solusi terhadap ketidakpastian hukum yang terjadi. Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi, serta bahan sekunder seperti literatur hukum dan penelitian terdahulu. Tinjauan pustaka menggunakan tiga teori utama, yaitu teori negara hukum (Stahl), teori kewenangan (Stout dan Ateng Syafrudin), dan teori kepastian hukum (Radbruch). Ketiga teori tersebut digunakan untuk menilai dasar normatif, cakupan legalitas, dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam konteks dualisme kewenangan pengadilan. Dalam praktiknya, akta pencatatan sipil memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), karena dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkret,

individual, dan final. Oleh sebab itu, PTUN secara yuridis merupakan forum yang lebih tepat untuk mengadili perkara pembatalan akta pencatatan sipil.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan Akta Pencatatan Sipil seharusnya menjadi kewenangan absolut PTUN, karena akta tersebut merupakan KTUN. Namun ketidaktegasan dalam UU Adminduk menyebabkan celah interpretasi dan inkonsistensi dalam penerapannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pertama, pembuat undang-undang perlu merevisi Pasal 72 UU Nomor 23 Tahun 2006 agar menyebutkan secara eksplisit pengadilan yang berwenang. Kedua, Mahkamah Agung perlu mengeluarkan pedoman atau Surat Edaran yang memberikan arahan yuridis dalam menentukan kompetensi absolut. Ketiga, pemerintah perlu menguatkan peran dan kapasitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerapkan asas *contrarius actus* secara maksimal. Implikasi dari penelitian ini sangat signifikan, karena memberikan kontribusi terhadap harmonisasi hukum, peningkatan efektivitas penyelesaian perkara, dan perlindungan terhadap hak-hak sipil masyarakat. Tesis ini memberikan argumen yang kuat bahwa penyelesaian sengketa pembatalan akta harus tunduk pada prinsip legalitas dan kepastian hukum, dengan pendekatan yuridis yang selaras antara norma hukum dan praktik peradilan.

KUMALASARI, SILVIA. 2025. KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** 122 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: kewenangan pengadilan, akta pencatatan sipil, pembatalan, kepastian hukum, hukum administrasi.

Akta Pencatatan Sipil, seperti akta kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian merupakan dokumen hukum penting yang menentukan status hukum keperdataan seseorang. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembatalan akta dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, ketentuan ini tidak menyebut secara eksplisit pengadilan mana yang berwenang, sehingga menimbulkan kekaburan hukum dan praktik dualisme antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data dikaji secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Teori negara hukum, teori kewenangan, dan teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis permasalahan kewenangan dan implikasi yuridisnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta pencatatan sipil memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), karena dikeluarkan oleh pejabat administratif yang berwenang dan menimbulkan akibat hukum individual. Oleh karena itu, PTUN merupakan forum yang paling tepat untuk mengadili perkara pembatalan akta tersebut. Ketidakjelasan norma dalam undang-undang telah menyebabkan ketidakteraturan praktik peradilan dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan revisi undang-undang dan penerbitan pedoman Mahkamah Agung untuk menjamin keseragaman praktik dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

KUMALASARI, SILVIA. 2025. *The Authority of The Court in The Annulment of Civil Registration Acts*. Master of Law Program, Postgraduate Program, Universitas Lambung Mangkurat. Supervisor: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. 122 pages.

ABSTRACT

Keywords: court jurisdiction, civil registration act, annulment, legal certainty, administrative law.

This thesis examines the issue of judicial authority in the annulment of civil registration acts in Indonesia. Civil registration documents, such as birth, marriage, divorce, and death certificates, are legal instruments essential for establishing civil status and identity. Article 72, paragraph (1) of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration stipulates that annulment of such acts must be based on a court decision with permanent legal force. However, the provision does not specify which court has jurisdiction, resulting in legal ambiguity and dual practices between the General Court (District Court) and the Administrative Court (PTUN).

This normative legal research adopts statute, conceptual, and case approaches. The study relies on primary legal materials (statutes, court decisions), secondary sources (literature, legal opinions), and is analysed qualitatively. It applies the theory of the rule of law, the theory of authority, and the theory of legal certainty to assess the legal framework and implications of overlapping judicial jurisdictions.

The findings reveal that civil registration acts meet the criteria of administrative decisions (KTUN), as they are issued by government officials and are final, concrete, and individual. Therefore, for adjudicating annulment cases, the State Administrative Court is the appropriate forum. The research concludes that the absence of a clear judicial designation in the law leads to uncertainty and inconsistent court practices. It recommends revising the law to clarify jurisdiction and issuing Supreme Court guidelines to harmonise judicial practices and safeguard legal certainty for citizens.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "**Kewenangan Pengadilan dalam Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, yang dengan sabar, teliti, dan penuh dedikasi membimbing penulis dari awal hingga tersusunnya tesis ini. Bimbingan beliau bukan hanya dalam hal akademik, tetapi juga menjadi teladan dalam integritas dan kecintaan pada ilmu hukum;
4. Yang Terpelajar Dr. Suprpto, S.H., M.H. dan Dr. Anang S Tornado, S.H., M.H., M.Kn., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang konstruktif dalam ujian tesis, serta turut memperkaya pemahaman penulis terhadap isu yang diteliti;
5. Seluruh dosen pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang telah diberikan selama masa studi. Ilmu yang Bapak/Ibu berikan telah menjadi bekal berharga dalam pengembangan diri sebagai akademisi dan praktisi hukum;
6. Staf administrasi dan tenaga kependidikan Program Pascasarjana dan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas pelayanan dan bantuan yang

telah diberikan dengan tulus selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini;

7. Rekan-rekan satu angkatan di Program Magister Ilmu Hukum ULM, atas kebersamaan, dukungan moral, diskusi akademik, serta semangat belajar bersama yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan studi ini;
8. Keluarga tercinta, terutama kedua orang tua yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan doa, yang tak pernah lelah memberikan dorongan, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat sepanjang perjalanan pendidikan ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait kewenangan pengadilan dalam pembatalan akta pencatatan sipil.

Banjarmasin, Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN		
HALAMAN JUDUL DALAM		
HALAM PENGESAHAN		
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS		
HALAM MOTTO/PERSEMBAHAN		
HALAM PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS		
RINGKASAN		
ABSTRAK		
UCAPAN TERIMA KASIH		
DAFTAR ISI		
DAFTAR TABEL		
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Keaslian Penelitian	7
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
	E. Tinjauan Pustaka	13
	F. Metode Penelitian.....	33
	G. Sistematika Penulisan	45
BAB II	KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL	
	A. Kewenangan Pengadilan dalam Pembatalan Akta Pencatatan Sipil	48
	B. Implementasi Pembatalan Akta Pencatatan Sipil di Pengadilan	63
	C. Perbedaan Penafsiran dan Praktik Kewenangan Pengadilan dalam Pembatalan Akta Pencatatan Sipil	70
BAB III	KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MENGADILI PERKARA PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL	
	A. Implikasi Ketidakjelasan Kewenangan Pengadilan dalam Pembatalan Akta Pencatatan Sipil	77

B.	Kepastian Hukum Pengadilan yang Berwenang Mengadili Perkara Pembatalan Akta Pencatatan Sipil.....	87
C.	Kebijakan untuk Menjamin Kepastian Hukum Kewenangan Pengadilan Dalam Perkara Pembatalan Akta Pencatatan Sipil.....	106
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	120
B.	Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Perkara Pembatalan Akta Pencatatan Sipil di Pengadilan Negeri....	66
2.2 Perkara Pembatalan Akta Pencatatan Sipil di Pengadilan Tata Usaha Negara	68
3.1 Perbandingan Pengajuan Perkara Pembatalan Akta Pencatatan Sipil di Pengadilan Negeri dan PengadilanTata Usaha Negara	97